

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko. 2024, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Adrian Sutedi. 2022. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- A.Z. Abidin dan Andi Hamzah. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: yarsif Watampone
- Basrief Arief. 2006. *Korupsi dan Upaya Penegakkan Hukum (Kapita Selekta)*. Jakarta: Katalog Dalam Terbitan.
- Chairul Huda. 2015, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan- Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan ke-6 Jakarta: Kencana.
- Darwin Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti
- Dwi Atmoko. 2022. *Teori-Teori Hukum*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Eddy O.S. Hiariej. 2016, *Hukum Pidana*. Banten: Universitas Terbuka
- I Dewa Gede Atmadja. I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press
- Irwansyah, 2020. *Kajian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media
- Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirna Buana Media
- Maidin Gultom. 2018. *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Martiman Prodjoamidjojo. 1984. *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi Suatu Komentari*. Jakarta; Pradnya Paramita
- Makawimbang. 2014. *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media
- Mispansyah dan Amir Ilyas. 2016. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin dan Yurisprudensi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press. Mataram.
- Muhammad Djafar Saidi & Eka Merdekawati Djafar. 2021. *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh. 2017 *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru.
- Roeslan saleh. 1983, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Rosa Agustina, 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Shinta Agustina. et al. *Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: LeIP
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo
- Topo Santoso. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Utrecht, 1994. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas).

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refina Aditama

Yopie Morya Immanuel. 2021. *Diskresi Pejabat Pemerintahan dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung:Keni Media,

Zararah Azhim Syah. 2025. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch

Zainal Abidin Farid, 2018. *Hukum Pidana 1*, Ed.1, Cet. 5 Jakarta: Sinar Grafika.

Zararah Azhim Syah. 2025. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.

ARTIKEL/ JURNAL ILMIAH

Anisyanawati, 2025, *Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch*, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan.

Andika Rayhan Putra Herang. 2025. *Analisis Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong*. Jurnal Analisis Hukum. Volume 8 nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Muhammad Djaelani Prasetya, Arini Nur Annisa, Syachwal Tri Anugrah, 2025, *Handling Corruption as a Social System: AN AGIL-BASED Socio-Legal Analysis of Prosecutorial Practices in South Sulawesi*, Law Research Review Quarterly, Volume 11 No 4, Faculty Of Law Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Odie Faiz Guslan, 2018, *Tinjauan Yuridis Mengenai Batas Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 4 nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/Mpp/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan MA RI No. 13 PK/Pid.Sus/2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 837 K/Pid.Sus/2015

Putusan Pengadilan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2025/Pn.Jkt Pst

SUMBER INTERNET

Kompastv Lampung “*Sederet Nama Menteri Jokowi yang Terlibat Korupsi dari Tahun 2014-2023*”
<https://www.kompas.tv/regional/408303/sederet-nama-menteri-jokowi-yang-terlibat-korupsi-dari-tahun-2014-2023>

Hukum Online , 2024, *Memahami Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/> Diakses pada tanggal 9 Februari 2026.

Embun Prowanta, *Anggaran Perusahaan Berbasis Risiko: Suatu Kebutuhan?*,
<https://irmapa.org/anggaran-perusahaan-berbasis-risiko-suatu-kebutuhan/> Diakses pada tanggal 19 April 2026